

Kajian Pustaka : Evaluasi Kebijakan Penurunan Kasus Stunting

Literature Review: Evaluation of Stunting Case Reduction Policies

Desheila Andarini, Haerawati Idris, Rini Anggraini, Rahmalia Permatasari

Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya,
Jl. Raya Palembang - Prabumulih No.KM. 32, Indralaya Indah, Kec. Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir,
Sumatera Selatan 30862
Email: rahmaliaaps@gmail.com

Tanggal submit: 20 November 2023 ; Tanggal Penerimaan: 2 September 2025

ABSTRAK

Tingginya prevalensi kasus stunting di Indonesia yang berada pada urutan kedua menjadi suatu hal permasalahan yang harus ditemukan solusi untuk mengatasinya dengan membutuhkan banyak peran lintas sektor termasuk pemerintah untuk mengeluarkan suatu kebijakan guna menurunkan angka prevalensi stunting. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah literature review dengan melakukan telaah terhadap beberapa jurnal terindeks nasional maupun internasional seperti Google Scholar, NCBI, dan Science Direct dengan rentang terbit jurnal pada tahun 2018-2023. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yakni dalam beberapa jurnal yang telah ditelaah mayoritas adanya kurangnya pengoptimalan dalam implementasi kegiatan pencegahan dan penanggulangan stunting, rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat mengenai pencegahan stunting, dan tidak adanya perubahan perilaku yang signifikan oleh masyarakat sehingga dapat disimpulkan bahwa evaluasi dalam suatu kebijakan penurunan kasus gizi buruk stunting meliputi penilaian terhadap target yang telah dicapai seperti target penurunan tingkat kasus stunting, tingkatan asupan gizi yang dikonsumsi dan target perbaikan akses pelayanan kesehatan. Dengan demikian, perlu adanya pengoptimalan dalam penerapan kebijakan demi terwujudnya penurunan kasus stunting.

Kata Kunci : Pemerintah, Kasus Gizi Buruk, Evaluasi Kebijakan, Stunting.

ABSTRACT

The high prevalence of stunting cases in Indonesia, which is in second place, is a problem that must find a solution to overcome it, requiring many cross-sector roles, including the government, to issue a policy to reduce the stunting prevalence rate. The method used in this research is a literature review by reviewing several national and international indexed journals such as Google Scholar, NCBI, and Science Direct with the journal publication range in 2018- 2023. The results obtained from this research are that in several journals that have been reviewed, most of them show deficiencies in the implementation of stunting prevention and control activities, low levels of public knowledge regarding stunting prevention, and the absence of significant changes in behavior by the community so it can be concluded that evaluation in a policy Reducing stunting malnutrition cases includes an assessment of the targets that have been achieved, such as the target of reducing the level of stunting cases, the level of nutritional intake consumed and the target of increasing access to health services. Thus, there needs to be a breakdown in implementing policies in order to realize a reduction in stunting cases.

Keywords : Government, Malnutrition Cases, Policy Evaluation, Stunting.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi stunting cukup tinggi dibandingkan dengan negara lainnya yang memiliki tingkat pendapatan menengah. Kondisi tingginya kasus stunting tersebut apabila tidak segera diatasi dapat mempengaruhi terhadap kinerja pembangunan Indonesia baik yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan ketimpangan sosial. Apabila anak terlahir dalam kondisi sehat, mengalami tumbuh kembang dengan baik serta adanya dukungan dari sektor pendidikan yang berkualitas maka dapat menciptakan generasi penunjang kesuksesan pembangunan bangsa. Namun, apabila anak mengalami kondisi stunting maka hal tersebut memberikan efek terhadap IQ anak Indonesia sebesar 10-15 poin, adanya kualitas prestasi akademik anak yang buruk, dan apabila

kondisi stunting tersebut berlanjut maka dapat menurunkan pendapatan sebesar 20% pada saat usia kerja sehingga dapat meningkatkan kemiskinan dan menjadi ancaman bagi pembangunan bangsa (1).

Adanya kegagalan terhadap tumbuh kembang anak atau yang biasa dikenal dengan stunting dikategorikan sebagai suatu permasalahan gizi buruk dengan tingkat kasus cukup tinggi yang memberikan dampak terhadap kondisi sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Berdasarkan yang telah dijelaskan WHO mengatakan bahwa stunting adalah suatu kondisi adanya kegagalan terhadap pertumbuhan serta perkembangan yang biasa terjadi pada anak dimulai dari usia balita, kondisi stunting diakibatkan oleh kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu cukup lama. Apabila tidak segera diatasi maka akan berdampak

pada adanya hambatan dalam perkembangan fisik, gangguan pada mental, menurunnya fungsi kognitif, bahkan dapat berdampak pada kematian. Pada waktu yang akan datang, balita dengan permasalahan gizi seperti stunting memiliki risiko mengalami penurunan pada kemampuan intelektual, produktivitas, serta dapat mengalami adanya penyakit degeneratif. Stunting dapat terjadi mulai dari usia remaja, ibu hamil, ibu menyusui, saat periode pemberian MPASI, dan pada masa 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) (2).

Ditinjau dari *Millenium Development Goals* (MDGs) yang dianggap sebagai suatu deklarasi dalam pembangunan millennium serta berfokus pada pemenuhan hak dasar manusia yang mengarah terhadap peningkatan kualitas hidup. Dalam hal adanya kenaikan prevalensi stunting yang terjadi mayoritas pada negara termiskin, WHO mengusulkan target global angka penurunan stunting pada usia dibawah lima tahun sebesar 40%. Pada negara berkembang, adanya permasalahan gizi buruk pada masa pra-hamil dan ibu hamil dapat memberikan dampak pada lahirnya anak stunting. Dengan demikian, pemenuhan gizi dari segi makro dan mikro sangat dibutuhkan untuk meminimalisir risiko terkena stunting. Selain itu, kualitas dan kuantitas pada masa MP-ASI juga merupakan sebuah komponen penting dalam memicu penurunan risiko stunting karena mengandung sumber gizi makro dan mikro yang memiliki peran dalam pertumbuhan linear. Gizi ibu serta status kesehatan memegang peranan penting dalam penentu kasus stunting terutama pada balita (3).

Evaluasi dalam suatu kebijakan termasuk dalam suatu proses yang bertujuan untuk menilai hasil efektivitas proses serta suatu regulasi yang ditetapkan dalam mengatasi permasalahan, khususnya permasalahan gizi buruk stunting. Evaluasi dalam suatu kebijakan penurunan kasus gizi buruk stunting meliputi penilaian terhadap target yang telah dicapai seperti target penurunan tingkat kasus stunting, tingkatan asupan gizi yang dikonsumsi dan target perbaikan akses pelayanan kesehatan. Dalam penurunan kasus stunting, evaluasi kebijakan stunting memiliki peranan penting dalam mengukur indikator, identifikasi hambatan, dan melakukan perancangan solusi dengan melibatkan koordinasi pada lintas sektor serta berbagai *stakeholder* yakni pemerintah, masyarakat, dan sektor kesehatan. Upaya untuk menurunkan angka stunting yang dilakukan pemerintah melalui intervensi yang spesifik dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, Dinas Provinsi, Dinas tingkat Kabupaten/Kota (1).

Timor Leste dikategorikan sebagai negara dengan tingkat prevalensi paling tinggi dengan angka stunting sebesar 48,8% kemudian pada

urutan kedua yakni Indonesia dengan angka prevalensi mencapai 31,8%. Sedangkan, negara dengan tingkat prevalensi terendah yaitu Singapura dengan tingkat prevalensi hanya sebesar 2,8%. Selain menjadi permasalahan global dan kawasan, melihat angka prevalensi stunting di Indonesia, permasalahan stunting juga perlu mendapatkan perhatian. Selama 4 tahun terakhir dari tahun 2018-2021 angka prevalensi stunting nasional mengalami penurunan angka, hal ini tentunya sejalan dengan apa yang diharapkan. Akan tetapi, meskipun kasus stunting telah mengalami penurunan perlu adanya strategi dalam mencapai target prevalensi stunting pada tahun 2024 yaitu sebesar 14% maka dalam kurun waktu 3 tahun yang akan datang harus dapat menurunkan tingkat prevalensi tersebut sekitar 10% sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (4).

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah *Literature Review* dengan melakukan telaah terhadap beberapa jurnal terindeks nasional maupun internasional seperti *Google Scholar*, *NCBI*, dan *Science Direct*. Metode penelitian ini digunakan untuk mengetahui lebih jauh terhadap hasil evaluasi kebijakan penurunan kasus gizi buruk stunting sebab adanya keterbatasan peneliti dalam melakukan pengambilan data. Dalam melakukan pencarian terhadap sumber jurnal tersebut, penulis menggunakan beberapa kata kunci yakni stunting, evaluasi kebijakan, kasus gizi buruk, dan pemerintah. Penelitian dilakukan dengan melakukan telaah terhadap 25 jurnal yang terdiri dari 10 jurnal nasional dan 15 jurnal internasional dengan rentang tahun 2018 sampai 2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pembahasan

Berdasarkan telaah dari *literature review* beberapa jurnal internasional dan nasional dapat diketahui bahwa evaluasi kebijakan penurunan angka kasus gizi buruk stunting di beberapa penelitian yang telah dilakukan. Kebijakan tersebut belum berdampak secara signifikan terhadap pencegahan dan penurunan stunting yang dilihat dari dampak setiap orang memiliki akses terhadap informasi gizi dan pendidikan gizi, memiliki akses terhadap pangan yang bergizi dan belum adanya mencapai tujuan dalam hal memiliki akses terhadap pelayanan gizi dan kesehatan. Penanggulangan stunting di Indonesia

Hasil

Tabel 2.1 Hasil Analisis Literature Review

No	Judul Penelitian	Tahun	Nama Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Evaluasi Kebijakan Pencegahan Stunting di Pasaman Barat (7)	2022	Gusmiyati & Ramadani Yusran	Deskriptif Kualitatif	Evaluasi kebijakan erat kaitannya dengan dampak dari suatu kebijakan pemerintah karena setiap kebijakan akan selalu menghasilkan suatu dampak yang diharapkan maupun tidak diharapkan baik yang menguntungkan maupun tidak menguntungkan. Di Pasaman Barat belum berdampak secara signifikan terhadap pencegahan dan penurunan stunting yang dilihat dari dampak setiap orang memiliki akses terhadap informasi gizi dan pendidikan gizi, memiliki akses terhadap pangan yang bergizi dan belum adanya mencapai tujuan dalam hal memiliki akses terhadap pelayanan gizi dan kesehatan.
2.	Kebijakan Penanggulangan Stunting di Indonesia (1)	2018	Latifa Suhada Nisa	Desk Study dengan cara mengumpulkan data dan informasi melalui pemeriksaan dan analisis data dan informasi melalui data sekunder	Penanggulangan stunting di Indonesia sudah diatur oleh banyak regulasi dan memiliki kerangka kebijakan yang sangat baik, hanya saja implementasinya masih harus dioptimalkan. Kebijakan dan regulasi yang ada di tingkat pusat, harus juga diikuti dengan tindak lanjut di daerah hingga tingkat desa dan melibatkan tidak hanya sektor kesehatan tetapi juga sektor terkait lainnya. Kebijakan di daerah terkait kerjasama lintas sektor penanggulangan stunting perlu diformulasikan sedemikian rupa sehingga kebijakan yang ada bisa dilaksanakan oleh seluruh pihak terkait dan dapat bersifat mengikat, termasuk juga keterlibatan elemen masyarakat, akademisi, dan swasta.
3.	Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Berbasis Nagari di Nagari Kajai Pasaman Barat (8)	2022	Aprilia Kinanti & Rahmadani Yusran	Deskriptif Kualitatif	Implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan stunting berbasis nagari di Nagari Kajai masih belum dapat dilakukan secara optimal yang ditandai dengan masih kurangnya pengoptimalan dalam hal pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan stunting, rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat mengenai pencegahan stunting, dan tidak adanya perubahan perilaku yang signifikan oleh masyarakat.
4.	Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Stunting: Studi Kasus di Kabupaten Brebes (5)	2023	Liza Nurza & Chatila Maharani	Kualitatif dengan pendekatan studi kasus	Pelaksanaan kebijakan penanggulangan stunting di Kabupaten Brebes sudah diimplementasikan sesuai dengan peraturan yang ada walaupun dalam pelaksanaan kebijakan belum ada tercapainya tujuan dari pelaksanaan kebijakan yang disebabkan oleh beberapa kendala, namun dari segi aktor dan pelaksana sudah melaksanakan kebijakan dengan baik walaupun menurut informan dari lintas sektor masih belum maksimal. Dari aspek isi kebijakan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana untuk alat antropometri masih kurang ketersediaannya dan sumber daya manusia perlu ditingkatkan kompetensinya, aspek proses kebijakan berkaitan dengan program aksi sudah banyak program - program yang terlaksana dan terdapat SOP tertentu dalam pelaksanaannya, responsivitas pemerintah daerah dan dinas terkait cukup baik dan membantu dalam pelaksanaan program. Peraturan Bupati Brebes No. 50 tahun 2019 tentang Penanggulangan Stunting dari segi isi peraturan perlu dilakukan perubahan untuk menyesuaikan peraturan yang terbaru yaitu Peraturan Presiden No.72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
5.	Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi	2022	Nabila Udzrotu Shauma & Dini Gandini Purbaningrum	Deskriptif Kualitatif	Pelaksanaan implementasi kebijakan percepatan pencegahan stunting terintegrasi di Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang masih belum berjalan dengan optimal. Sumber daya manusia masih kurang baik dari segi kuantitas maupun kualitas para pelaksana khususnya yang berada di tingkat bawah. Karakteristik organisasi pelaksana belum terpenuhi dengan baik masih terdapat pelaksanaan yang tidak memiliki SOP dalam menjalankan kebijakan. Sikap para pelaksana, tanggapan para pelaksana dalam menjalankan kebijakan sudah cukup baik, namun pemahaman pelaksana dalam menjalankan kebijakan masih kurang. Komunikasi dan koordinasi antar OPD yang berada di tingkat bawah masih kurang, sehingga masih terdapat kegiatan dalam pencegahan stunting yang tidak tepat sasaran. Kondisi lingkungan sosial, lingkungan ekonomi dan lingkungan politik yang berada di Kecamatan Rajeg belum sepenuhnya mendukung keberhasilan kebijakan.

sudah diatur oleh banyak regulasi dan memiliki kerangka kebijakan yang sangat baik, hanya saja implementasinya masih harus dioptimalkan yang disebabkan oleh kurangnya pengoptimalan dalam hal pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan stunting, rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat mengenai pencegahan stunting, dan tidak adanya perubahan perilaku yang signifikan oleh masyarakat. Berdasarkan penelitian Liza, dkk (5) menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan penanggulangan stunting di Kabupaten X sudah diimplementasikan sesuai dengan peraturan yang ada walaupun dalam pelaksanaan kebijakan belum ada tercapainya tujuan dari pelaksanaan kebijakan yang disebabkan oleh beberapa kendala. Namun, dari segi aktor dan pelaksana sudah melaksanakan kebijakan dengan baik.

Stunting didefinisikan sebagai suatu permasalahan gizi buruk yang disebabkan oleh adanya kekurangan zat gizi sehingga menyebabkan anak mengalami kegagalan pada masa pertumbuhannya. Kondisi stunting adalah kondisi seorang anak mengalami tinggi badan yang lebih rendah dibandingkan anak seusianya. Pada balita, stunting dapat menyebabkan terganggunya pertumbuhan dan perkembangan intelektual anak sehingga dapat memberikan dampak pada menurunnya tingkat produktivitas, meningkatnya risiko degeneratif, meningkatnya risiko kelahiran bayi dengan BBLR di masa yang akan datang, bahkan dapat menyebabkan kematian. Adanya kondisi anak mengalami stunting menunjukkan bahwa adanya kekurangan gizi atau malnutrisi dalam jangka waktu yang cukup panjang. Permasalahan malnutrisi di Indonesia menjadi permasalahan kesehatan yang belum dapat diatasi dengan sepenuhnya oleh berbagai lintas sektor termasuk pemerintah. Hal tersebut didukung oleh adanya data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 yang memaparkan bahwa prevalensi stunting di Indonesia sebanyak 19,3% lebih tinggi dibandingkan pada tahun sebelumnya.

Jumlah prevalensi kasus stunting pada anak usia dibawah lima tahun di Asia Tenggara di tahun 2020 menunjukkan bahwa negara dengan angka prevalensi tertinggi berada pada negara Timor Leste dengan angka stunting sebesar 48,8% dan pada urutan kedua adalah Indonesia sebanyak 31,8%. Negara dengan tingkat prevalensi rendah ialah Singapura hanya sebanyak 2,8%. Selama periode 2018-2021 angka prevalensi stunting tingkat nasional terjadi penurunan kasus, hal tersebut tentu saja sesuai target yang diharapkan oleh berbagai macam pihak. Strategi untuk menurunkan angka kasus stunting dengan target pada tahun 2024 dapat sebesar 14% tentu saja diperlukan sesuai dengan yang ditinjau dalam RPJMN 2020-2024 dan

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Pada tahun 2021 angka kasus stunting di Indonesia sebanyak 24,4% dan pada tahun 2022 sebesar 21,6%.

Menindaklanjuti dari Kementerian Kesehatan dan Bank Dunia maka kemudian terdapat penyusunan Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting. Strategi nasional bertujuan sebagai panduan untuk dapat mendorong kerjasama antar lembaga guna memastikan konvergensi seluruh rangkaian program mengenai stunting. Penyusunan strategi nasional melibatkan berbagai pihak yakni kementerian, akademisi, organisasi profesi, organisasi masyarakat madani, serta dunia organisasi usaha. Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting (Stranas Stunting) disusun melalui adanya proses penilaian dan diagnosis pencegahan stunting, termasuk identifikasi prioritas kegiatan. Penyusunan strategi ini bertujuan untuk memastikan agar semua sumber daya diarahkan dan dialokasikan untuk dapat mendukung dan membiayai kegiatan yang bersifat prioritas, terutama untuk meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan gizi pada kelompok ibu hamil dan anak usia 0- 23 bulan atau rumah tangga 1.000 Hari Pertama Kehidupan. Strategi nasional mengenai stunting ini disusun agar semua pihak di berbagai tingkatan dapat melakukan kerjasama untuk mempercepat pencegahan stunting. Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting terdiri dari lima pilar yakni komitmen dan visi kepemimpinan, kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku, konvergensi program tingkat pusat, daerah dan desa, ketahanan pangan dan gizi, serta pemantauan dan evaluasi. Dalam proses evaluasi kebijakan penurunan angka stunting terdapat beberapa komponen yang perlu diperhatikan yakni meliputi komponen input, komponen proses, dan komponen output.

A. Komponen Input

1. Sumber Dana

Dana yang digunakan pada kebijakan penurunan kasus gizi buruk stunting di masyarakat berasal dari dana internal desa yang diberikan oleh pemerintah pusat dan berbagai sektor lainnya. Berdasarkan hal tersebut, mayoritas dana terhadap program kebijakan penurunan kasus gizi buruk stunting tetap berjalan. Selain itu, sumber dana diperoleh dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diberikan melalui Dinas Kesehatan. Apabila konvergensi pendanaan tidak dapat terlaksana secaraimbang maka hal tersebut dapat menyebabkan terhambatnya penurunan kasus stunting bahkan program tersebut tidak dapat berjalan dan diimplementasikan dengan baik (6).

2. Sumber Daya Manusia

Dalam suatu penelitian, terdapat beberapa hasil yakni adanya jumlah petugas kesehatan yang minim sehingga menjadi tantangan dalam pelaksanaan proses kebijakan. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu jumlah kader kesehatan terjadi penambahan sebanyak 6 orang yang kemudian dilakukan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan kader untuk membantu bidan desa dan petugas di puskesmas setempat. Jumlah tenaga kesehatan di Indonesia dilakukan analisa melalui Kajian Sektor Kesehatan oleh Bappenas pada tahun 2019. Ditinjau dari hasil kajian tersebut, adanya kekurangan dari jumlah SDM bidang kesehatan dalam program penyelenggaraan program kebijakan penurunan kasus stunting. Minimnya jumlah tenaga kesehatan di puskesmas dapat memicu dampak yakni adanya peningkatan beban kerja pada petugas yang dapat menyebabkan menurunnya kualitas kinerja dari SDM (6).

3. Prosedur Pelaksanaan

Dalam prosedur pelaksanaan ditemukan tidak ada kendala yang dialami oleh petugas dalam pelaksanaan program stunting. Pihak Dinas Kesehatan telah memberikan informasi terstandar yang berkorelasi terhadap proses implementasi promosi kesehatan terhadap balita untuk mencegah stunting. Materi tersebut kemudian dicetak serta diperbanyak oleh petugas puskesmas kemudian dibagikan kepada masing-masing bidan desa. Dalam beberapa penelitian yang telah dilakukan menyatakan bahwa perlu adanya pengawasan serta monitoring dari kepala puskesmas mengenai penggunaan prosedur pelaksanaan tersebut serta prosedur tersebut perlu ditempel pada tempat yang mudah dijangkau tidak hanya disimpan saja. Obat, Suplemen, Pemberian Makanan Tambahan dan Alat Kesehatan

Mayoritas, pihak Dinas Kesehatan dapat memenuhi ketersediaan obat dan vitamin yang dijadikan sebagai penunjang program stunting. Ketersediaan obat sudah cukup kemudian obat tersebut didistribusikan dari Dinas Kesehatan tingkat Kabupaten untuk diserahkan ke puskesmas agar dapat sesuai sasaran. Namun, dalam beberapa keadaan seperti saat COVID-19 kebutuhan biskuit yang dijadikan sebagai makanan tambahan pada balita secara umum tidak mampu untuk dipenuhi oleh pihak Dinas Kesehatan. Akibatnya, masyarakat harus dapat menyediakan kebutuhan secara mandiri sebab adanya keterbatasan pemenuhan makanan tambahan. Namun demikian, susu tetap diberikan pada kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P) selama 4 bulan dengan sumber dana yakni dana desa. Sedangkan, alat kesehatan yang dijadikan sebagai penunjang dalam kegiatan penurunan kasus gizi buruk stunting meliputi alat ukur tinggi badan, berat

badan, lingkaran lengan atas, dan lingkaran kepala masih dapat terjamin validitasnya dan relatif baru.

B. Komponen Proses

1. Perencanaan dan Penganggaran

Tahap perencanaan program penurunan kasus gizi buruk stunting dilakukan oleh penanggung jawab bidang gizi pada masing-masing puskesmas dengan berkolaborasi bersama penanggung jawab KIA, promosi kesehatan, dan penanggung jawab bidang sanitasi. Pada tahap perencanaan tentu saja harus sesuai dengan saran pemerintah pusat dan daerah, sebelum perencanaan hendaknya dilakukan kegiatan rembug stunting dengan mengikutsertakan *stakeholder* yang berperan penting dalam program

2. Pengorganisasian

Pada tahap pengorganisasian, terdapat pemberian tanggung jawab dan wewenang kepada penyelenggara program kegiatan penurunan angka stunting. Dalam proses pengorganisasian tentu saja terlibat berbagai sektor pada tingkat pemerintahan provinsi, kabupaten, dan desa.

3. Pelaksanaan

Pada tahap ini tentu saja terjadi kendala utama pada saat kegiatan berlangsung yang meliputi banyaknya program yang mengalami penundaan, adanya penurunan cakupan kunjungan petugas puskesmas ke desa, dan adanya penambahan beban kerja pada setiap individu yang terlibat dalam pelaksanaan program. Hambatan ini semakin meningkat khususnya pada masa pandemi yang mengakibatkan kegiatan promosi dan konseling terhadap pemberian makanan bayi dan anak tidak dapat dilaksanakan

4. Pengawasan dan Pelaporan

Kegiatan tahap pengawasan untuk menurunkan kasus gizi buruk stunting dilakukan secara berkesinambungan oleh pihak puskesmas dengan penanggung jawab utama yakni penanggung jawab puskesmas bidang program gizi dan bidan puskesmas. Dalam tahap pengawasan terdapat garis besar komponen yakni progres pelaksanaan kegiatan, kendala pada saat pelaksanaan program, dan perkembangan balita yang mengalami stunting. Tahap pelaporan dilakukan satu bulan sekali dan dilakukan secara bertahap dari bawah ke atas dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan. Hasil dari pelaporan pelaksanaan kegiatan dijadikan sebagai bahan pelaporan pertanggungjawaban terhadap dana desa yang telah digunakan.

C. Komponen Output

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, pelaksanaan program pemberian vitamin A dan

tablet obat cacic pada balita dapat lebih dari 80% karena adanya rekapitulasi data yang belum masuk ke puskesmas. Namun, pemberian suplemen F-100, biskuit tinggi kalori pada balita serta pemberian susu telah tercapai secara keseluruhan. Persentase jumlah balita yang mengalami stunting telah terjadi penurunan dibandingkan pada saat COVID-19 di tahun 2020.

Adanya penurunan angka stunting pada balita tersebut terjadi sebagai dampak dari adanya usia balita yang semakin bertambah serta terdapat beberapa pendapat yakni apabila anak yang tergolong stunting tidak termasuk dalam kelompok balita maka seharusnya tidak lagi menjadi fokus utama program penurunan angka stunting. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Nabila Udzrotu Shauma & Dini Gandini Purbaningrum (2022) menyatakan bahwa dalam proses penerapan kebijakan tidak hanya didukung oleh sumber daya manusia tetapi juga sumberdaya fasilitas atau sarana prasarana serta finansial yang ditinjau dari adanya kekurangan pada fasilitas untuk melaksanakan kegiatan pencegahan serta penanggulangan stunting.

Regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai penurunan kasus gizi buruk stunting dilakukan tindak lanjut dan diinterpretasikan dalam rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh lembaga terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai perwujudan dari intervensi yang dilakukan oleh pemerintah. Intervensi yang dilakukan oleh pemerintah diklasifikasikan menjadi 2 jenis yakni intervensi sensitif dan intervensi spesifik. Intervensi spesifik dilakukan oleh Kementerian Kesehatan melalui puskesmas dan posyandu. Sedangkan, intervensi sensitif dilakukan oleh sektor lain diluar bidang kesehatan. Intervensi spesifik yang diberikan oleh pemerintah dapat diklasifikasikan berdasarkan sasaran program. Sasaran ibu hamil dilakukan melalui perlindungan ibu hamil terhadap kurangnya zat besi, asam folat, dan energi serta protein kronis, perlindungan ibu hamil terhadap kekurangan yodium dan perlindungan ibu hamil terhadap penyakit malaria. Sasaran ibu menyusui dan anak usia 0-6 bulan dilakukan pemberian Inisiasi Menyusui Dini (IMD), pemberian edukasi kepada ibu mengenai pentingnya memberikan ASI eksklusif, pemberian imunisasi dasar, melakukan pemantauan terhadap tumbuh kembang balita setiap bulan serta melakukan penanganan secara tepat pada bayi yang sakit.

Sasaran ibu menyusui dan anak usia 7-23 bulan dilakukan melalui pemberian edukasi kepada ibu untuk memberikan ASI hingga usia 23 bulan disertai dengan MP-ASI, menyediakan obat cacic, memberikan suplementasi zink, perlindungan terhadap penyakit malaria dan diare, serta memberikan imunisasi. Intervensi sensitif dilaksanakan melalui berbagai

program kegiatan yakni meliputi penyediaan akses air bersih, penyediaan akses sanitasi melalui program STBM, fortifikasi bahan pangan, menyediakan JKN dan Jampersal, memberikan pengasuhan pada orang tua dan anak usia dini, memberikan edukasi kesehatan dan reproduksi, gizi remaja, serta pemberantasan terhadap kemiskinan. Ditinjau dari aspek global, dari serangkaian intervensi yang telah dilaksanakan memperoleh hasil yakni adanya penurunan prevalensi stunting.

KESIMPULAN

Evaluasi dalam suatu kebijakan termasuk dalam suatu proses yang bertujuan untuk menilai hasil efektivitas proses serta suatu regulasi yang ditetapkan dalam mengatasi permasalahan, khususnya permasalahan gizi buruk stunting. Evaluasi dalam suatu kebijakan penurunan kasus gizi buruk stunting meliputi penilaian terhadap target yang telah dicapai seperti target penurunan tingkat kasus stunting, tingkatan asupan gizi yang dikonsumsi dan target perbaikan akses pelayanan kesehatan. Dalam penurunan kasus stunting, evaluasi kebijakan stunting memiliki peranan penting dalam mengukur indikator, identifikasi hambatan, dan melakukan perancangan solusi dengan melibatkan koordinasi pada lintas sektor serta berbagai *stakeholder* yakni pemerintah, masyarakat, dan sektor kesehatan. Metodologi penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah *Literature Review* dengan melakukan telaah terhadap beberapa jurnal terindeks nasional maupun internasional seperti *Google Scholar*, *NCBI*, dan *Science Direct* dengan menggunakan beberapa kata kunci yakni stunting, evaluasi kebijakan, kasus gizi buruk, dan pemerintah. Evaluasi kebijakan stunting tersebut meliputi tiga komponen yakni input, proses, dan output. Dalam rangka penurunan kasus angka stunting diperlukan intervensi sensitif yang dilaksanakan melalui berbagai program kegiatan yakni meliputi penyediaan akses air bersih, penyediaan akses sanitasi melalui program STBM, fortifikasi bahan pangan, menyediakan JKN dan Jampersal, memberikan pengasuhan pada orang tua dan anak usia dini, memberikan edukasi kesehatan dan reproduksi, gizi remaja, serta pemberantasan terhadap kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Latifa, S. N. (2018). Kebijakan Penanggulangan Stunting di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 13(2), 173–179.
2. Nur, E. et al. (2023). Kebijakan Penanggulangan Stunting Di Indonesia. *Jurnal Akuntan Publik*, 1(2), 1–15. <http://jkjournal.com/index.php/menu/article/view/78>

3. Rahman, Z. et al. (2021). Analisis Kebijakan Pencegahan Stunting dan Relevansi Penerapan di Masyarakat (Studi Kasus: Desa Donowarih). *Jurnal Karta Rahardja*, 2(1), 27–33. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
4. Rahman, H., Rahmah, M., & Saribulan, N. (2023). UPAYA PENANGANAN STUNTING DI
5. Nurva, L., & Maharani, C. (2023). Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Stunting: Studi Kasus di Kabupaten Brebes. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 12(02), 74–83.
6. Arumsari, W., Supriyati, D., & Sima, P. (2022). Evaluasi Pelaksanaan Program Pencegahan Stunting di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia*, 10(2), 82–
7. Gusmiyati, G. (2022). Evaluasi Kebijakan Pencegahan Stunting di Pasaman Barat. *Journal Of Policy, Governance, Development and ...*, 299–304. <http://pgde.ppj.unp.ac.id/index.php/pgde/article/view/135%0Ahttp://pgde.ppj.unp.ac.id/index.php/pgde/article/download/135/39>
8. Kinanti, A., & Yusran, R. (2022). Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Berbasis Nagari di Nagari Kajai Pasaman Barat. *Journal of Civic Education*, 5(3), 293–300. <https://doi.org/10.24036/jce.v5i3.720>